

**IDENTIFIKASI LAYANAN BARU UNTUK PENGAMBILAN KEBIJAKAN TARIF LAYANAN  
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM  
(POLICY BRIEF BLU UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG)**

**Zakiyul Fuad Zein<sup>1</sup>**

UIN Sayyid Ali Rahmtullah Tulungagung<sup>1</sup>

Email: staintulungagung@gmail.com<sup>1</sup>

**Abstrak**

Tulisan ini adalah policy brief yang bertujuan untuk mengungkapkan aspek layanan umum yang mampu dikembangkan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pengalistasian dari institut ke universitas di beberapa perguruan tinggi Islam negeri yang banyak terjadi di dekade ini diawali dengan semangat menuju kemajuan ilmu pengetahuan yang ada di masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Proses integrasi antara ilmu agama dan ilmu sains menjadi tolok ukur kemajuan sebuah perguruan tinggi. Di sisi lain, selain ilmu pengetahuan, alih status institusi ini juga berangkat dari spirit perbaikan layanan pendidikan yang bisa dilakukan lewat BLU. Dengan BLU ini universitas tidak lagi hanya memberikan pengetahuan integrasi ilmu pengetahuan dan agama melainkan juga bagaimana sebuah universitas mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada lingkungan akademik universitas. Artikel ini setidaknya memberikan gambaran layanan apa saja yang mampu dikembangkan oleh BLU UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi.

**Kata Kunci:** Identifikasi, Badan Layanan Umum, Pendapatan

**PENDAHULUAN**

Perguruan Tinggi Islam Negeri di Indonesia terus mengalami peningkatan yang pesat dari sisi kelembagaan. Pada tahun 2022 sudah ada 58 Universitas Islam Negeri (UIN), 24 Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan 5 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). (data kementerian agama) Transformasi kelembagaan dalam tubuh perguruan tinggi di bawah naungan kementerian agama ini tidak luput dari kerja keras semua elemen yang ada di dalam

perguruan tinggi beserta pihak yang ada di kementerian agama. Semua bersinergi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi sehingga bisa menjadikan PTKIN menjadi perguruan tinggi yang unggul.<sup>12</sup>

Perubahan bentuk dari kelembagaan di perguruan tinggi keagamaan islam ini diiringi dengan transformasi keilmuan secara menyeluruh. Adanya perubahan bentuk ini dilakukan dalam rangkai memenuhi tuntutan perkembangan ilmu

<sup>1</sup> Ahmad Suradi, "Analisis Format Ideal Transformasi Institut Menuju Universitas Di PTKIN," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 3, no. 1 (2018): 1–14.

<sup>2</sup> "Lagi, Lima IAIN Bertransformasi Menjadi Universitas Islam Negeri," n.d., accessed July 7, 2022, <https://kemenag.go.id/read/lagi-lima-iaain-bertransformasi-menjadi-universitas-islam-negeri-y5g5j>.

pengetahuan dan teknologi dan proses integrasi keilmuan agama islam dengan sains. Dengan begitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Proses transformasi pun diiringi dengan penguatan bidang sarana prasarana serta manajemen pengelolaan kelembagaan.<sup>3</sup>

Proses transformasi kelembagaan IAIN menuju UIN banyak dilakukan dalam dua tahun terakhir. Pada 2021 ada enam IAIN statusnya berubah menjadi UIN yakni IAIN Tulungagung berubah menjadi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, IAIN Purwokerto menjadi UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, IAIN Surakarta menjadi UIN Raden Mas Said Surakarta, IAIN Samarinda menjadi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno dan IAIN Jember menjadi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. (referensi) Keenam perguruan tinggi di atas, tidak semuanya merubah statusnya menjadi satuan kerja badan layanan umum (BLU). Dari jumlah tersebut, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang telah ditetapkan sebagai satker BLU.<sup>45</sup>

Ditetapkannya UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menjadi satker BLU itu dilakukan pada 9 Maret 2020, pada tahun tersebut statusnya

masih IAIN Tulungagung. Menjadi bagian dari satker BLU ini membuat lembaga tersebut bisa memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan.<sup>6</sup> Pungutan biaya tersebut menjadi pendapatan BLU yang dapat digunakan untuk membiayai belanja BLU.<sup>7</sup> BLU di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung masih dua tahun berjalan, sehingga belum mempunyai banyak pendapatan. Pendapatan BLU di UIN Satu Tulungagung masih didominasi dari layanan pendidikan. Seharunya, BLU UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dituntut selalu berupaya meningkatkan pendapatan terutama dari layanan non akademik. Pendapatan yang besar akan menjadikan BLU mempunyai peluang yang lebih besar untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berangkat dari hal tersebut, artikel ini berupaya untuk mengungkapkan beberapa aspek ekonomi yang dapat dikembangkan oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam rangka meningkatkan pendapatannya. Artikel ini ditulis dengan konsep *policy brief*. Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2016 tentang pedoman penelitian dan pengembangan di kementerian dalam

<sup>3</sup> Nur Arifin, "Kebijakan Transformasi IAIN Menjadi UIN Pada Kementerian Agama Republik Indonesia (RI)" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

<sup>4</sup> Rahma Indina Harbani, "6 IAIN Ini Resmi Berubah Jadi UIN, Ini Harapan Menag," n.d., accessed July 7, 2022, <https://www.detik.com/edu/perguruan->

[tinggi/d-5586886/6-iain-ini-resmi-berubah-jadi-uin-ini-harapan-menag](https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-5586886/6-iain-ini-resmi-berubah-jadi-uin-ini-harapan-menag).

<sup>5</sup> Menteri Keuangan; "Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum"; PMK No. 129/PMK.05/2020; 2020; pasal 31.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid; pasal 41

negeri dan pemerintah daerah, policy brief itu suatu media yang menguraikan dasar rasional dalam pemilihan sebuah alternatif kebijakan tertentu atau rangkain tindakan dalam sebuah kebijakan saat ini. Kadang, digunakan pada proses advokasi kebijakan sebagai alat untuk meyakinkan para pengambil kebijakan mengenai urgensi masalah saat ini dan kebutuhan untuk mengadopsi alternative yang disukai. Sehingga, adanya policy brief itu untuk mendorong pengambil kebijakan.<sup>8</sup>

Dalam proses penyusunnya artikel ini, didasarkan dengan data-data yang komperhensif. Data primer diperoleh melalui observasi terhadap potensi layanan baru yang dapat disediakan oleh BLU dan observasi terhadap layanan yang sudah ada namun belum dilakukan pungutan biaya layanan. Adapun data sekunder berupa data layanan BLU yang sudah dilakukan pungutan layanan/sudah ada tarifnya. Ruang lingkup artikel ini adalah identifikasi potensi layanan yang akan dan sudah diselenggarakan oleh BLU UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam upaya peningkatan pendapatan BLU.

## **PEMBAHASAN**

### **Badan Layanan Umum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung**

Pemerintah Indonesia memunculkan model baru dalam pengelolaan instansi pelayanan public dengan mengimplementasikan pola pengelolaan keuangan (PPK) Badan Layanan Umum (BLU). Model ini diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil. Instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi memberi pelayanan pada masyarakat diminta untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efesiensi, dan efektivitas. Namun, demikian BLU tidak dapat diimplementasikan dengan mudah.<sup>9</sup>

Keberadaan BLU itu sebuah instansi yang diberikan mandate oleh kementerian untuk menyelenggarakan pelayanan public, seperti layanan pendidikan, kesehatan dan pengelolaan kawasan serta pengelolaan dana. Menurut Thynne<sup>10</sup> dalam Egeberg<sup>11</sup> dan trondal pemberian mandate tersebut dimaksudkan untuk memberikan perbedaan fungsi pemerintah sebagai regulator, sekaligus sebagai upaya mengembangkan aktivitas pengangan.

---

<sup>8</sup> "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 – JDIH Pemerintah Provinsi Bali," accessed July 7, 2022, <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan/katalog/23509>.

<sup>9</sup> Budi Waluyo, "Analisis Permasalahan Pada Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum," *Jurnal Infoartha* 3, no. 12 (2014): 27–38.

<sup>10</sup> Ian Thynne, "Making Sense of Organizations in Public Management: A Back-to-Basics Approach," *Public organization review* 3, no. 3 (2003): 317–332.

<sup>11</sup> Morten Egeberg and Jarle Trondal, "Agencification and Location: Does Agency Site Matter?," *Public Organization Review* 11, no. 2 (2011): 97–108.

Pelayanan public tidak harus diselenggarakan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi diselenggarakan oleh instansi yang dikelola seperti bisnis dengan menerapkan prinsip kewirausahaan dan manajemen sektor swasta.<sup>12</sup>

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.<sup>13</sup> Mewirausahakan pemerintah adalah paradigma yang memberi arah yang tepat bagi sektor keuangan publik untuk mendorong peningkatan pelayanan. Pengelolaan Keuangan BLU diharapkan dapat menyuburkan pewadahan baru bagi pembaharuan manajemen keuangan

sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.<sup>14</sup>

BLU dituntut dapat meningkatkan pendapatan dengan menjalankan praktik bisnis yang sehat. BLU diharapkan dapat terus berstrategi dan berinovasi untuk memberikan peningkatan pelayanan optimal, dan menjadi bagian penting dalam pemulihan ekonomi.<sup>15</sup> Sebagai lembaga pendidikan, core bisnis BLU UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah pendidikan sehingga mayoritas pendapatan BLU diperoleh dari layanan di bidang pendidikan. Namun pengembangan layanan non akademik harus terus dilakukan karena upaya dalam meningkatkan pendapatan BLU tidak boleh membebani mahasiswa karena satker BLU dibentuk sebagai upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Richard C Box, "Running Government like a Business: Implications for Public Administration Theory and Practice," *The American Review of Public Administration* 29, no. 1 (1999): 19–43.

<sup>13</sup> Menteri Keuangan; "Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum"; PMK No. 129/PMK.05/2020; 2020; pasal 1.

<sup>14</sup> Nawasis; "Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum"; [nawasis.org/portal/digilib/read/pengelolaan-](http://nawasis.org/portal/digilib/read/pengelolaan-keuangan-badan-layanan-umum/47657)

[keuangan-badan-layanan-umum/47657](http://nawasis.org/portal/digilib/read/pengelolaan-keuangan-badan-layanan-umum/47657); diakses tanggal 8 Maret 2021.

<sup>15</sup> Dit. PK BLU; "Digitalisasi Pengelolaan Bisnis BLU"; <http://blu.djpbk.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/news/view&id=68>; diakses tanggal 8 Maret 2021.

<sup>16</sup> Indonesia; "Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum"; PP No. 23; 2005; pasal 1.

**Tabel 1. Tarif Layanan BLU IAIN Tulungagung**

No.	Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pendaftaran mahasiswa baru S-1 jalur mandiri	100.000	Percalon mahasiswa
2	Pendaftaran mahasiswa baru S-2	375.000	Percalon mahasiswa
3	Pendaftaran mahasiswa baru S-3	500.000	Percalon mahasiswa
4	SPP persemester mahasiswa S-2	3.750.000	Persemester
5	SPP persemester mahasiswa S-3	6.000.000	Persemester
6	Wisuda S-2	750.000	Permahasiswa
7	Wisuda S-3	900.000	Permahasiswa
8	Matrikulasi S-2 dan S-3	300.000	Permahasiswa
9	Keanggotaan perpustakaan S-2 dan S-3	100.000	Permahasiswa
10	Ujian akhir tesis	1.900.000	Permahasiswa
11	Ujian akhir disertasi S-3 terbuka dan tertutup	12.000.000	Permahasiswa
12	Layanan bahasa asing mahasiswa S-2 dan S-3	300.000	Permahasiswa

**Sumber:** Keputusan Rektor IAIN Tulungagung No. 166 tahun 2020

Pada tabel pertama menyajikan data layanan yang sudah mempunyai tarif atau dasar pengutannya. Adapun tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) ditetapkan melalui Keputusan Menteri

Agama No. 176 Tahun 2021. Adanya uang kuliah tunggal ini digunakan dasar sebagai mahasiswa membayar. Kemudian uang tersebut dikelola oleh kampus

**Tabel 2. Layanan BLU Yang Ditarifkan Melalui UKT**

No.	Layanan
1	Kegiatan kelas
2	Kegiatan laboratorium/studio/bengkel/lapangan
3	Tugas akhir/proyek akhir/skripsi
4	Bimbingan konseling
5	Kemahasiswaan

**Sumber:** Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 6906 tahun 2020

Pada tabel kedua menyajikan data layanan yang menjadi komponen Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (BOPT). BOPT menjadi salah satu unsur dalam

perhitungan Biaya Kuliah Tunggal (BKT). BKT menjadi salah satu unsur dalam perhitungan UKT. Jadi layanan pada

Tabel dua sudah dipungut kepada mahasiswa melalui tarif UKT.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, layanan BLU yang belum diterapkan tarif layanan yaitu, (*pertama*) Ma'had Al-Jami'ah. Saat ini ini tarif layanan ma'had belum dipungut. Hal ini akan membebani keuangan BLU karena penyelenggaraan layanan ma'had membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk honor tenaga pengajar dan biaya operasional manajemen ma'had. Biaya penyelenggaraan ma'had tidak masuk ke dalam komponen Biaya Kuliah Tunggal (BKT) mahasiswa karena kapasitasnya yang masih terbatas hanya untuk 400 mahasiswa. Saat ini mahasiswa IAIN Tulungagung berjumlah lebih dari 23.000 mahasiswa. Jika hanya sebagian kecil mahasiswa yang bisa mendapatkan layanan ma'had dengan gratis, hal ini akan berpotensi menimbulkan gejolak bagi mahasiswa yang lain. Pemberlakuan tarif atas layanan Ma'had al-Jami'ah akan mendorong peningkatan kualitas dan kesinambungan layanan Ma'had Al-Jami'ah. (*Kedua*) Semester Pendek. Semester pendek merupakan layanan khusus bagi mahasiswa yang menempuh ulang mata kuliah tertentu karena nilai yang diperoleh sebelumnya belum memenuhi standar yang diinginkan. Mata kuliah pada semester pendek juga diperuntukkan bagi mahasiswa semester atas yang mata kuliahnya sudah tidak tersedia lagi pada mata kuliah reguler. Jumlah mahasiswa

yang menempuh semester pendek tidak banyak, namun karena itu biaya operasionalnya menjadi tinggi karena honor mengajar dosen dibayarkan berdasarkan jumlah SKS tidak berdasarkan jumlah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tersebut. BLU harus mengeluarkan biaya tambahan untuk honor mengajar semester pendek sehingga mahasiswa yang menempuh semester pendek patut dipungut tarif layanan.

Selain layanan yang sudah ada, upaya peningkatan pendapatan BLU dapat dilakukan dengan mengembangkan jenis layanan baru. *Pertama*, dengan memaksimalkan pelatihan bahasa asing. BLU UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mempunyai Pusat Pengembangan Bahasa. Pusat pengembangan bahasa ini dikelola dengan cukup profesional dengan sudah pernah menjalankan tes TOEFL ataupun tes bahasa arab. Dengan kemampuan ini, diharapkan mampu memberikan inovasi agar bisa menjadi bagian dari pendapatan pada BLU, mengingat sekarang ini banyak masyarakat yang membutuhkan lembaga kursus dan pelatihan bahasa asing, hal ini tentunya menjadi peluang yang berpotensi menjadi pendapatan bagi BLU. Investasi yang dilakukan juga tidak akan besar karena saat ini baik sarana dan prasarana maupun SDM sudah tersedia.

*Kedua*, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mempunyai laboratorium komputer yang representatif.

Laboratorium ini berisikan perangkat komputer dengan spec yang cukup memadai untuk digunakan pengoperasionalan software desain ataupun lainnya. Melihat potensi ini, banyak masyarakat yang membutuhkan lembaga kursus dan pelatihan komputer, hal ini tentunya menjadi peluang yang berpotensi menjadi pendapatan bagi BLU. Investasi yang dilakukan juga tidak akan besar karena saat ini baik sarana dan prasarana maupun SDM sudah tersedia.

*Ketiga*, penyediaan biro haji dan umroh. BLU UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mempunyai SDM yang cukup untuk mendirikan biro haji dan umroh. Banyak pegawai UIN Tulungagung yang menjadi petugas haji ditambah banyaknya SDM yang memahami dan mengerti tentang tata cara ibadah haji menjadikan peluang bagi BLU untuk mendirikan biro haji dan umroh. Selain itu, kampus pernah ditunjuk oleh Kanwil Kemenag Jawa Timur untuk menyelenggarakan bimbingan pada petugas haji. Dengan munculnya biro haji dan umroh bisa menjadi peluang tersendiri apalagi animo masyarakat Tulungagung dan sekitarnya cukup tinggi untuk beribadah umroh atau haji.

Keempat, penyediaan jasa biro konsultasi dan psikologi. BLU UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mempunyai program studi Psikologi Islam (PI). Sebagian tenaga pengajar sudah mempunyai sertifikat untuk praktik sebagai psikolog. Hal ini

merupakan peluang. Dengan SDM dan sarana prasarana yang dimiliki sangat memungkinkan bagi BLU untuk mendirikan jasa biro konsultasi dan psikologi. Jasa ini terutama dibutuhkan oleh perusahaan/instansi dalam melakukan rekrutmen pegawai baru.

Kelima, penyediaan jasa biro hukum. BLU UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mempunyai Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Hal ini merupakan peluang untuk mendirikan jasa biro hukum. Saat ini, fakultas tersebut sudah melakukan kerjasama dengan instansi dan lembaga di bidang hukum. Potensi ini dapat dikembangkan BLU untuk mendirikan jasa biro hukum.

Keenam penyediaan jasa day care. BLU UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mempunyai tenaga pengajar program studi Pendidikan Anak Usia Dini (PIAUD) dan PI. Dengan SDM yang dimiliki, BLU layak untuk mendirikan layanan penitipan anak. Sebagai langkah awal, calon konsumen yang disasar adalah para pegawai IAIN Tulungagung yang sekarang ini lebih dari 600 orang. Satu sisi hal ini akan meningkatkan kenyamanan para pegawai yang mempunyai anak kecil karena dapat dititipkan di dekat tempat mereka bekerja. Selanjutnya, unit usaha ini dapat dikembangkan untuk melayani masyarakat luar kampus. Tentu saja SDM/tenaga pengajar yang akan ditunjuk untuk mengelola unit usaha tersebut tidak akan terlibat secara langsung setiap hari karena tugas utama mereka adalah mengajar. Mereka akan

ditempatkan pada sisi manajemen. Adapun operasional di lapangan, dapat merekrut tenaga dari mahasiswa sekaligus sebagai tempat praktik mahasiswa PIAUD dan PI.

Ketujuh adalah jasa catering. Jumlah pegawai lebih dari 600 orang merupakan calon konsumen potensial untuk penyelenggaraan usaha catering oleh BLU. Hal ini juga dapat meningkatkan kenyamanan para pegawai karena tidak perlu keluar kantor untuk mencari makan. Selain itu, catering juga dapat menysar penyediaan konsumsi kegiatan-kegiatan di dalam kampus. Kegiatan wisuda yang dilaksanakan tiga kali dalam setahun dan pertemuan dengan wali mahasiswa baru membutuhkan konsumsi yang banyak, kebutuhan konsumsinya dapat dipenuhi oleh unit usaha catering BLU. Selanjutnya catering BLU dapat dikembangkan untuk melayani masyarakat di luar kampus.

Kedelapan, bidang usaha supermarket. Penyediaan layanan supermarket dapat meningkatkan layanan BLU kepada mahasiswa dan pegawai dengan penyediaan kebutuhan barang konsumtif. Layanan supermarket juga akan memudahkan bagi mahasiswa dan pegawai untuk mencari barang kebutuhan sehari-hari mereka. Jumlah mahasiswa pegawai yang besar merupakan pasar calon konsumen potensial. Selanjutnya layanan supermarket dapat dikembangkan untuk melayani masyarakat di luar kampus.

Kesembilan, layanan jilid dan penggandaan tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi). Jilid dan penggandaan tugas akhir mahasiswa selama ini dilakukan oleh fihak luar kampus. Ini merupakan potensi pendapatan bagi BLU. BLU dapat mengembangkan layanan jilid dan penggandaan tugas akhir di dalam kampus. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi mahasiswa. Jilid dan penggandaan akan sesuai dengan standar yang ditetapkan kampus. Lebih praktis karena mahasiswa tidak perlu ke luar kampus.

Menurut penulis, bahwa komponen layanan BLU yang belum dipungut atau belum ada tarifnya adalah: Ma'had Al-Jami'ah dan Semester pendek. Adapun layanan baru yang dapat dikembangkan oleh BLU seperti pelatihan bahasa asing, pelatihan komputer, penyediaan jasa biro haji dan umroh, enyediaan jasa biro konsultasi dan psikologi, penyediaan jasa biro hukum, penyediaan jasa day care (penitipan anak), catering, supermarket, Layanan jilid dan penggandaan tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi). Penyediaan layanan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan BLU. Pendapatan yang besar memberikan kesempatan kepada BLU UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa harus menaikkan tarif UKT yang akan membebani mahasiswa.



## **KESIMPULAN**

Pada kesimpulan, artikel ini berisikan tentang rekomendasi kebijakan. Penulis merekomendasikan kepada pimpinan mengambil langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama, memungut tarif layanan pada Ma'had Al-Jami'ah dan semester pendek karena layanan tersebut tidak masuk dalam komponen tarif UKT. Kedua, mengembangkan layanan baru dengan memanfaatkan SDM dan sumber dana yang dimiliki dalam upaya meningkatkan pendapatan BLU. Ketiga upaya meningkatkan pendapatan BLU ditekankan pada pengembangan layanan non akademik melalui unit bisnis tidak dengan menaikkan tarif UKT agar tidak membebani mahasiswa karena BLU dibentuk sebagai upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Arifin, Nur. "Kebijakan Transformasi IAIN Menjadi UIN Pada Kementerian Agama Republik Indonesia (RI)." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Al Usrah, C. R., Mutafarifa, B., & Fahmi, M. F. (2021). Persepsi Muslim, Etika Dan Nilai Bisnis Dari Karaoke Syariah. *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(1), 47-62
- Box, Richard C. "Running Government like a Business: Implications for Public Administration Theory and Practice." *The American Review of Public Administration* 29, no. 1 (1999): 19–43.
- Egeberg, Morten, and Jarle Trondal. "Agencification and Location: Does Agency Site Matter?" *Public Organization Review* 11, no. 2 (2011): 97–108.
- Harbani, Rahma Indina. "6 IAIN Ini Resmi Berubah Jadi UIN, Ini Harapan Menag," n.d. Accessed July 7, 2022. <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-5586886/6-iain-ini-resmi-berubah-jadi-uin-ini-harapan-menag>.
- Suradi, Ahmad. "Analisis Format Ideal Transformasi Institut Menuju Universitas Di PTKIN." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 3, no. 1 (2018): 1–14.
- Thynne, Ian. "Making Sense of Organizations in Public Management: A Back-to-Basics Approach." *Public organization review* 3, no. 3 (2003): 317–332.
- Waluyo, Budi. "Analisis Permasalahan Pada Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum." *Jurnal Infoartha* 3, no. 12 (2014): 27–38.

## **Sumber Perundang-undangan dan Website**

- Dit. PK BLU; "Digitalisasi Pengelolaan Bisnis BLU"; <http://blu.djpbkn.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/ne>

ws/view&id=68; diakses tanggal 8 Maret 2021.

Indonesia; “Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum”; PP No. 23; 2005; pasal 1.

Menteri Keuangan; “Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum”; PMK No. 129/PMK.05/2020; 2020.

Nawasis; “Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum”; nawasis.org/portal/digilib/read/pengelolaan-keuangan-badan-layanan-umum/47657; diakses tanggal 8 Maret 2021.

“Lagi, Lima IAIN Bertransformasi Menjadi Universitas Islam Negeri,” n.d. Accessed July 7, 2022. <https://kemenag.go.id/read/lagi-lima-iain-bertransformasi-menjadi-universitas-islam-negeri-y5g5j>.

Isnaini, U. N. (2020). Analysis Of Health Assessment With Camel Method In An Nisa's Cooperative, Blitar City. *Balance: Journal Of Islamic Accounting*, 1(02), 92-107.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 – JDIH Pemerintah Provinsi Bali.” Accessed July 7, 2022. <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan/katalog/23509>.